

ANALISIS PENILAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM MENANGGULANGI BENCANA

Naufal Ridho Aji¹, Tri Asih Wismaningtyas²

Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang
Utara, Jawa Tengah 56116, Telp (0293) 364113 Fax. (0293)
3624383 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR,
Magelang

Email: naufal.rdh@students.untidar.ac.id,
triasihwismaningtyas@untidar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya berpotensi mengalami berbagai macam bencana alam maupun non alam, salah satu wilayah yang berpotensi memiliki bencana yang tinggi karena kondisi geografisnya adalah Kabupaten Magelang. Berdasarkan kondisi geografisnya, pemerintah Kabupaten Magelang mendirikan BPBD sebagai badan penanggulangan bencana daerah untuk menangani bencana di wilayah tersebut. Cara untuk mengetahui kinerja BPBD dapat dilihat melalui lima aspek yaitu, kualitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana melalui kelima indikator tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang mana dalam penelitian ini cenderung bersifat analisis dan deskriptif dalam menganalisis penilaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan kelima indikator yang digunakan untuk menganalisis penilaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas karyawan. Namun, disamping itu tetap harus ada ruang perbaikan agar efektivitas dan kemandirian BPBD Kabupaten Magelang dapat ditingkatkan dalam menghadapi bencana di masa depan.

Keywords: Kinerja, Mitigasi Bencana, BPBD

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau yang memiliki populasi lebih dari 279 juta penduduk. Secara geografis, Indonesia terletak di persilangan dua samudra besar (Pasifik dan Hindia) dan dua lempeng benua (Asia dan Australia), serta dilintasi garis khatulistiwa. Iklimnya tropis dengan dua musim yang jelas, yakni musim kemarau dan musim hujan. Kondisi geografis ini memberikan potensi besar terjadinya berbagai bencana alam seperti

gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan tanah longsor. Tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, yang membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB bertugas mengatasi semua tahapan kebencanaan, dari pra bencana hingga pasca bencana, dengan fokus utama pada penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Adanya asas desentralisasi

daerah, maka perlu juga adanya instansi yang bertanggung jawab dalam menanggulangi bencana di daerah yang dibawah langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magelang menanggapi kondisi geografis wilayahnya dengan mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD bertanggung jawab atas berbagai kegiatan seperti pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi, dengan tujuan menghadapi bencana dengan cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi. Langkah-langkah ini diambil karena Kabupaten Magelang memiliki potensi bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya. Hal ini dapat menyebabkan dampak serius seperti korban jiwa, kerusakan alam, kerugian materi, dan dampak psikologis yang dapat menghambat pembangunan daerah.

Informasi mengenai bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang selama satu tahun terakhir ini dapat diakses melalui sistem yang bernama SIKK (Sistem

Naufal Ridho,dkk - Analisis Penilaian

Informasi Kebencanaan Kabupaten) Magelang. Dalam SIKK, tercatat terdapat 7 bencana alam dan 2 bencana non alam yang terjadi dengan total bencana pada tahun 2023 mencapai 429 bencana selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Jenis bencana yang paling banyak terjadi pada tahun tersebut ada pada bencana alam yaitu angin kencang, tanah longsor dan kekeringan. Bencana yang datang tentunya membawa dampak kerusakan bangunan dan adanya korban jiwa. Berdasarkan data bencana satu tahun terakhir ini, menimbulkan dampak kerusakan bangunan sebanyak 329 rusak ringan, 49 rusak sedang dan 31 mengalami rusak berat. Selain kerusakan bangunan, bencana yang terjadi juga memakan 5 korban jiwa dan 16 diantaranya mengalami luka-luka.

Adanya bencana baik itu alam maupun non alam, keduanya memiliki potensi untuk menimbulkan dampak kerugian dan mengakibatkan korban jiwa. Maka dari itu, untuk meminimalisir kerugian baik yang bersifat materiil maupun non-materiil diperlukan upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang mana tugas-tugas ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Dalam menjalankan tugasnya dari tahap pra sampai pasca bencana, dibutuhkan

kinerja dan koordinasi pegawai yang efektif dari para pegawai. Penilaian terhadap kinerja BPBD Kabupaten Magelang dapat dilihat melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang dapat ditemukan di situs web resmi BPBD Kabupaten Magelang. IKM digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap respon dan pelayanan yang diberikan oleh BPBD dalam menghadapi bencana.

Hasil survei dari IKM memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja BPBD dalam menangani bencana. Penilaian kinerja memiliki peran penting bagi pegawai dan perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian berlanjut pada proses evaluasi, dimana pimpinan dapat membuat keputusan untuk memperbaiki kinerja karyawan, menetapkan kompensasi yang sesuai dan adil, menempatkan karyawan berdasarkan keahlian dan kemampuannya, menyelenggarakan program pelatihan, serta menentukan jenjang karier karyawan. Di samping itu, juga dapat menjadi acuan dalam manajemen tim dan perencanaan tugas di masa yang akan datang.

Hasil kajian literatur terdahulu mengenai penilaian kinerja BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana terdapat beberapa penelitian yaitu, Pertama adalah penelitian yang berjudul Analisis kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan

Naufal Ridho,dkk - Analisis Penilaian

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau. permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja seperti apa yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Berau dalam penanganan kebakaran hutan di daerah tersebut (Djupiansyah, 2020). Hasil penelitian menunjukkan kinerja pegawai BPBD Kabupaten Berau dalam menangani kebakaran hutan dan lahan dinilai sudah baik. penilaian tersebut berdasarkan indikator kompetensi seperti cepat tanggap, sosialisasi dan komunikasi yang intensif.

Kedua adalah Penelitian yang berjudul Hubungan Pelatihan Dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan pelatihan yang diterapkan BPBD Kota Bandar Lampung dengan kinerja yang dicapai pegawainya (Ahiruddin, 2020). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil hipotesis terdapat hubungan pelatihan dengan kinerja BPBD Kota Bandar Lampung.

Ketiga adalah penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Semarang (Wisnu Bagus Prayoga & Nur Afni Manullang, 2023). Permasalahan dalam penelitian ini terkait bagaimana efektivitas dari kinerja BPBD Kabupaten Semarang ditinjau dari responnya menghadapi bencana dan

kendala yang dihadapi korban, serta beban kerja yang dialami BPBD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan program kerjanya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa BPBD Kabupaten Semarang telah melakukan usaha peningkatan respon melalui beberapa kegiatan, namun dalam penilaian efektivitasnya masih terdapat kendala seperti prosedur pengaduan yang panjang, pendidikan & sosialisasi dinilai kurang, respon lambat.

Keempat adalah penelitian yang berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan (Revi dan Febri, 2023). Permasalahan yang diangkat yaitu seberapa besar pengaruh pengalaman kerja dan kualitas kerja terhadap kinerja dari BPBD kabupaten pesisir selatan. Hasil penelitian menunjukkan pengalaman kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BPBD kabupaten pesisir selatan dan kualitas pekerjaan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai BPBD kabupaten pesisir selatan.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan terkait permasalahan yang diangkat, pada keempat penelitian tersebut membahas mengenai kinerja BPBD dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di daerahnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus

permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini memiliki 5 indikator yaitu, kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian (Robbins, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait penilaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dengan menggunakan lima aspek tersebut.

Berdasarkan hasil telaah kajian literatur terdahulu mengantarkan pada penilaian kinerja BPBD dalam penanggulangan dan pencegahan bencana dapat ditinjau dari berbagai aspek. Setiap aspek yang digunakan dapat menjadi acuan dalam menilai kinerja BPBD Kabupaten Magelang. Pada penelitian ini, mengkonseptualisasikan kelima indikator yang telah ditentukan untuk menganalisis kinerja BPBD Kabupaten Magelang melatarbelakangi penelitian. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai penilaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang yang berdasarkan pada kelima indikator tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang dalam mengatasi dan mencegah bencana, terutama dengan memperhatikan kelima indikator yang telah ditetapkan. Maka,

penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Magelang berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, judul penelitian yang diberikan adalah “Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis dan deskriptif. Berlangsung di Kantor BPBD Kabupaten Magelang, penelitian ini melibatkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Staf Ahli Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Staf Pengelola Layanan Operasional sebagai narasumber. Data primer dikumpulkan langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan tertulis, buku-buku dan paper. Penelitian ini menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh. Tujuan analisis adalah untuk memahami dan menggambarkan kondisi dan situasi yang terkait dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPBD adalah badan atau lembaga non-departemen pemerintah yang tugasnya bertanggung jawab dalam menangani penanggulangan bencana baik di tingkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya BPBD harus berpedoman pada kebijakan dan arahan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sesuai dengan tanggung jawabnya dalam kegiatan penanggulangan bencana, BPBD membantu tugas bupati dalam penanggulangan bencana sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. Namun, sebelum BPBD terbentuk, penanggulangan di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi Penanggulangan Bencana. Setelah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 ditetapkan baru dibentuklah BPBD Kabupaten Magelang secara resmi. Kemudian dilakukan pengangkatan jabatan secara resmi pejabat struktural BPBD pada tanggal 22 Oktober 2011, sehingga pada saat itu juga BPBD Kabupaten Magelang mulai beroperasi dan melaksanakan tugas dan kewenangannya dibawah naungan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.

Data Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2023



sumber: <http://bpbd.magelangkab.go.id/>

Berdasarkan data yang diambil dari BPBD Kabupaten Magelang tercatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi sebanyak 429 bencana. Diantaranya yakni angin kencang sebanyak 112 kejadian, tanah longsor sebanyak 97 kejadian, kebakaran bangunan sebanyak 75 kejadian, kekeringan sebanyak 62 kejadian, kebakaran hutan sebanyak 55 kejadian, kejadian lain sebanyak 24 kejadian, banjir sebanyak 2 kejadian, erupsi gunung sebanyak 1 kejadian dan gempa bumi sebanyak 1 kejadian yang terjadi selama tahun 2023. Hal ini juga memberikan dampak akibat bencana tersebut diantaranya 5 korban meninggal dunia, 16 korban luka-luka, 17 korban mengungsi. Selain itu, bencana yang terjadi mengakibatkan beberapa infrastruktur rusak, seperti 326 rumah rusak ringan, 49 rumah rusak sedang, dan 31 rumah rusak berat. Data ini diperoleh dari Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK) Magelang yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Magelang.

Analisis Pengukuran Kinerja Karyawan BPBD Kabupaten Magelang

Pengukuran kinerja karyawan adalah proses sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa efektif, pekerjaan yang dilakukan setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Analisis pengukuran kinerja karyawan dalam BPBD Kabupaten Magelang merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja BPBD Kabupaten Magelang menjalankan tugasnya dalam menanggulangi bencana di daerah Kabupaten Magelang.

Menurut Robbins (2016:260) terdapat lima aspek utama yang menjadi indikator pengukuran kinerja karyawan yaitu: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Penulis menggunakan kelima aspek tersebut dalam mengukur kinerja BPBD Kabupaten Magelang. Dari hasil tersebut ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Kualitas

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.39
U2	Prosedur	3.48
U3	Waktu Pelayanan	3.51
U4	Biaya/Tarif	3.66
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.56
U6	Kompetensi Pelaksana	3.49
U7	Perilaku Pelaksana	3.51
U8	Penanganan Pengaduan, Saran	3.52
U9	Sarana dan Prasarana	3.52

IKM UNIT PELAYANAN :	87.87
	BAIK

sumber: <http://bpbd.magelangkab.go.id/>

Dari segi kualitas penulis menggunakan

dasar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai sumber penilaian organisasi. Menurut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap BPBD Kabupaten Magelang tahun 2023, tercatat bahwa BPBD mendapatkan nilai sebesar 87,87 sehingga dapat dikategorikan baik dari segi pelayanan terhadap masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini minimal diisi oleh 200 responden dan tercatat pada tahun 2023 ada 235 responden yang mengisi survei ini melalui 2 metode, yakni melalui penyebaran kuesioner dengan *google form* dan mengisi kuesioner melalui blangko yang telah disediakan BPBD Kabupaten Magelang.

Selain itu, untuk membentuk kualitas sumber daya manusianya BPBD Kabupaten Magelang mengadakan program peningkatan kapasitas SDM dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Staf Ahli Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Ibu Theopila Anastasia S.Pd. sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan kinerja karyawan, BPBD telah melakukan peningkatan kapasitas terhadap TRC (Tim Reaksi Cepat) dan re sebanyak dua kali dalam setahun. TRC sendiri adalah tim bagian dari BPBD yang ada di setiap kecamatan yang mana akan terjun ke lapangan pertama kali sebagai garda terdepan pada saat terjadi bencana. Maka dari itu, TRC ini harus terus dilatih agar lebih terampil dan cekatan dalam menanggulangi bencana di tiap kecamatan.”

(Wawancara kepada Ibu Theopila, 02 April 2024)

Dari data tersebut penulis menyimpulkan bahwa staf BPBD Kabupaten Magelang melaksanakannya dengan cukup baik. Ditambah lagi adanya peningkatan kapasitas untuk karyawan agar dalam upaya menanggulangi bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tanggap sehingga penanggulangan bencana dapat diselesaikan dengan baik.

2. Kuantitas

Dari tahap prabencana hingga tanggap darurat dan pascabencana, BPBD bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengoordinasikan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah. BPBD Kabupaten Magelang memiliki personel internal sebanyak 63 yang terdiri dari 25 pegawai ASN dan 38 non ASN dan terbagi dalam beberapa bidang. Terdapat beberapa personil fungsional dan struktural, 18 personel satgas dan 6 personel pusdalop (Pusat Pengendalian dan Operasional). Pusdalop siaga selama 24 jam menerima dan memberi informasi bencana, khususnya merapi yang menjadi ikonik di Kabupaten Magelang dan terus aktif setiap harinya.

Selain personel internal, BPBD juga memiliki dua Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap kecamatan yang berkewajiban bertugas di kantor BPBD. Total TRC yang ada yaitu sebanyak 44 dari 21 kecamatan dan PMI serta Orari. Selain memiliki satuan tugas tanggap bencana yang terdiri dari berbagai komponen dan individu dari PMI, TNI, POLRI, tenaga kesehatan dan lintas sektor terkait, BPBD Kabupaten Magelang

juga memiliki satuan tugas tanggap bencana yang terdiri dari unsur masyarakat, unsur pemerintah, dan unsur masyarakat lainnya. BPBD sendiri memiliki relawan yang diperkirakan sebanyak 4000 relawan. Namun, jika terjadi bencana yang sangat besar yang mana harus mengungsikan lebih dari 150 ribu orang, BPBD Kabupaten Magelang bekerja sama dengan relawan di seluruh Jawa Tengah. Dari hasil data SDM dan pernyataan yang telah kami peroleh dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BPBD memiliki kuantitas yang cukup dalam sumber daya manusianya dalam menangani bencana.

3. Ketepatan Waktu

BPBD memiliki beberapa bidang, salah satunya adalah Pusdalop. Pusdalop merupakan bidang yang menerima serta menginformasikan bencana yang terjadi dengan cepat. Kesiagaan Pusdalop selama 24 jam bertujuan untuk kecepatan penginformasian kepada masyarakat ketika terjadi bencana. Selain kecepatan informasi dari Pusdalop, BPBD juga memiliki satgas yang siap siaga ketika terjadi bencana. Berdasarkan pernyataan dari narasumber, pihak satgas sudah dapat memprediksi bencana yang akan terjadi melihat dari bentuk dan posisi awan, sehingga satgas sudah menyiapkan segala keperluan nya sebelum adanya informasi. Sistem penginformasiannya pun dari kecamatan yang melaporkan, kemudian satgas langsung terjun ke lapangan lima menit setelah adanya laporan. Akan tetapi jika bencana yang

terjadi masih dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah wilayah yang terdampak, maka satgas BPBD tidak harus turun ke wilayah tersebut.

Meskipun BPBD berupaya untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, tidak dapat dijamin bahwa mereka selalu dapat melakukannya. Waktu respons BPBD dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas bencana, keterbatasan sumber daya, keterbatasan informasi, faktor cuaca dan lingkungan, serta koordinasi antarinstansi.

Namun demikian, BPBD terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam merespons bencana, sehingga dapat memberikan tanggapan yang cepat dan tepat waktu. Mereka mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih baik, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dan melaksanakan latihan dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, BPBD Kabupaten Magelang memiliki kedisiplinan yang tinggi mengenai ketepatan waktu dalam penanganan bencana. Mengingat bahwa bencana alam merupakan masalah yang sangat penting dan membutuhkan pertolongan dengan cepat, maka dari itu ketepatan dan kecepatan personel dalam menanggapi adanya bencana sangat diperlukan dari BPBD. Meskipun ada kendala yang mungkin terjadi, BPBD

berkomitmen untuk menangani bencana dengan sebaik-baiknya dan memberikan respons yang cepat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Efektivitas

Untuk melihat seberapa efektif kinerja BPBD Kabupaten Magelang, penulis melihat bagaimana karyawan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam menanggulangi bencana. Dalam menanggulangi bencana, BPBD Kabupaten Magelang melihat seberapa besar bencana yang terjadi terlebih dahulu. Lalu menerjunkan anggota dalam proses mitigasi lalu dilakukan proses pengevakuasian dan membuat laporan untuk dikirimkan di kantor pusat BPBD Kabupaten magelang.

Berdasarkan laporan yang penulis dapat dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Magelang, Bapak Mhd Muzamil A.Md, S.K.M bahwa sejauh ini selama menangani bencana tergantung pada besar kecilnya bencana yang terjadi. Oleh karena itu, waktu yang digunakan untuk menanggulangi bencana tidak dapat dipastikan seberapa lama penanggulangan bencana akan selesai. Namun, terdapat kendala dalam penanganan bencana, contohnya saat kekeringan akibat kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Magelang kemarin. Bahwasanya, BPBD Kabupaten Magelang sedikit kewalahan karena hanya memiliki 2 mobil tangki air saja yang digunakan untuk menyalurkan air

bersih ke 62 titik kekeringan di Kabupaten Magelang, sehingga untuk penanganan kekeringan masih kurang dan belum optimal karena terkendala alat transportasi yang dimiliki. Namun, untuk mengatasi hal tersebut BPBD Kabupaten Magelang juga bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Damkar, Petani, dan Warga dalam menyalurkan air bersih ke 62 titik kekeringan.

5. Kemandirian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang tidak berjalan secara mandiri. BPBD bekerja sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana yang lebih luas, yang melibatkan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, relawan, dan masyarakat umum dalam upaya penanggulangan bencana yang disebut dengan tim kontingensi penanganan kebencanaan. BPBD memiliki peran penting dalam koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemulihan pasca bencana. Mereka bekerja sama dengan OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Pangan, Pemadam Kebakaran dan LSM untuk mengatasi berbagai aspek penanggulangan bencana.

Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk memperoleh dukungan dan koordinasi yang lebih luas dalam penanggulangan bencana. Dengan

kerja sama dan koordinasi yang baik antara BPBD, OPD terkait, LSM, relawan, dan masyarakat umum, diharapkan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

4. SIMPULAN

Secara keseluruhan, kinerja BPBD Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Namun, diperlukan juga adanya ruang perbaikan khususnya dalam mengatasi kendala-kendala yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan kemandirian dalam menghadapi bencana di masa depan serta meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Rekomendasi untuk BPBD Kabupaten Magelang yakni harus mampu menanggulangi bencana dengan lebih tanggap lagi, kemudian untuk informasi mengenai kebencanaan yang belum masif diketahui masyarakat bisa digencarkan lagi melalui sosialisasi terkait SIKK. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana BPBD dengan bekerjasama dengan OPD terkait. Terakhir, untuk menanggulangi bencana di tiap daerah BPBD Kabupaten Magelang bisa melakukan perekrutan relawan di setiap kecamatan untuk membantu tugas BPBD dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adhari, I. Z. (2021). *Optimalisasi Kinerja Karyawan Menggunakan Pendekatan Knowledge Management dan Motivasi Kerja*. Pasuruan: Qiara Media.
- [2] Dr. Daniel Adi Setya Raharjo S.E., M. M. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- [3] Hartini, A. M. (2021). *Kinerja Karyawan Konsep Penilaian Kinerja Di Perusahaan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- [4] Novia Ruth Silaen, S. R. (2021). *Kinerja Karyawan*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- [5] Tewal, B., Adilfina, Pandowo, M. C., & Tawas, H. N. (2018). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Patra Media Grafindo.
- [6] Izma Fatima, D. P. (2023). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang. *Vol. 3, No. 1*, 136-150.
- [7] Prayoga, W. B., & Manullang, N. A. (2023). Analisis Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Semarang. *Vol. 4, No. 2*, 240-248.
- [8] Zainuddin, N. N. (2021). Penilaian

- Kinerja Satuan Tugas Terbaik Menggunakan Metode Mfep Pada Kantor Bpbd Kota Tanjungbalai. *Vol. 1, No. 2*, 127-134.
- [9] Fajar, R. N., & Susanti, F. (2023). Pengaruh Pengalaman Kerja dan Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1343-1355.
- [10] Ahiruddin, A., & Elina, M. (2020). Hubungan Pelatihan Dengan Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 4(4), 21-28.
- [11] Ganie, D., Isroiyah, I., & Buchori, D. (2021). ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BERAU. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 6 (2), 1-8.
- [12] Martins, P. N., & Sudarmo. (2023). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Dili. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 76-87.
- [13] Roychani, M. (2024, 07 Januari). *Infografis Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2023*. Retrieved from BPBD PEMKAB MAGELANG: <https://bpbd.magelangkab.go.id/home/detail/infografis-bencana-kabupaten-magelang-tahun-2023/810>
- [14] Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. (2011, Juni 09). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang*. Retrieved from Database Peraturan JDIH BPK: [Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details?link=1&id=1234567&url=/organisasi-dan-tata-kerja-badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-magelang)

